

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Meli Oktarina
Rosida Diani
Muhammad Tohir

ABSTRAK

Mencermati ruang lingkup hukum perusahaan yang begitu luas, tampaknya para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT). Sebagaimana kita ketahui sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT dibagi menjadi dua, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan dan keduanya berbadan hukum. PT Perorangan merupakan PT yang bisa didirikan oleh satu orang saja asalkan dia memenuhi kriteria sebagai UMKM. sehingga menimbulkan berbagai masalah sebagai berikut, Bagaimanakah Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan?

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan cara empiris, dengan menggunakan metode penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dari narasumber dan observasi dari lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti data yang diperoleh langsung dari narasumber pejabat Notaris yang terkait, bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian dilapangan serta metode analisis data akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan pembahasan dan analisa, maka diperoleh kesimpulan bahwa, Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Proses pendirian ini mengharuskan pendiri untuk mendaftarkan sendiri PT Perorangan secara elektronik ke Menteri Hukum dan HAM. Panduan Pendaftaran PT Perorangan terdapat pada laman <https://ahu.go.id>, Aplikasi Pendaftaran PT Perorangan merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup satu orang saja. Kelebihan Perseroan Terbatas Perorangan, yaitu Dapat didirikan cukup 1 (satu) orang saja, Tidak memerlukan akta notaris, Kekayaan individu terpisah, Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, Memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki 100% saham. Kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan, yaitu Hanya dipimpin oleh satu orang, Kegiatan semacam pembelian, pemasaran, pengaturan karyawan, dan produksi hanya dilakukan oleh satu orang, Pemilik usaha mempunyai tanggung jawab ganda (Pengurus dan pemodal), Hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro, serta Modal terbatas.

Kata Kunci : PT Perorangan, Pendirian, Kelebihan dan Kekurangan.

ABSTRACT

Observing the broad legal scope of the company, it seems that business people are more interested in establishing a legal entity in this case a Limited Liability Company (PT). As we know since the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, PT is divided into two, namely PT Perusahaan Modal and PT Individual and both are legal entities. Individual PT is a PT that can be established by only one person as long as he meets the criteria as an MSME. thus causing various problems as follows, How is the Implementation of the Establishment of an Individual Limited Liability

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



Company according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? What are the Advantages and Disadvantages of an Individual Limited Liability Company?

This study uses empirical research, using research methods with field data as the main source, such as the results of interviews from sources and observations from the field. Sources of data used in this study are primary and secondary data, consisting of primary legal materials such as data obtained directly from relevant Notary officials, secondary legal materials such as draft laws, research results, and tertiary legal materials such as dictionaries, law dictionary. The data collection method used is by means of field research and data analysis methods will be analyzed qualitatively.

Based on the discussion and analysis, it was concluded that, Implementation of the Establishment of Individual Limited Liability Companies According to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, this establishment process requires founders to register their own PT Individuals electronically to the Ministry of Law and Human Rights. The PT Individual Registration Guide is available on the <https://ahu.go.id> page, the PT Individual Registration Application is an application that will help Micro and Small Enterprises (UMK) register individual businesses with only one founder. The advantages of an Individual Limited Liability Company are that only 1 (one) person can be established, Does not require a notary deed, Separate individual assets, Legal entity status is obtained after registering a statement of establishment electronically, Allows business actors to own 100% of shares. Disadvantages of an Individual Limited Liability Company, which is only led by one person, Activities such as purchasing, marketing, employee management, and production are only carried out by one person, Business owners have multiple responsibilities (administration and capital), Only for small and micro businesses, and Limited capital.

Keywords: Individual PT, Establishment, Strengths and Weaknesses.

LATAR BELAKANG

Mencermati ruang lingkup hukum perusahaan yang begitu luas, tampaknya para pelaku bisnis lebih tertarik mendirikan badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) tersebut. Menyadari pesatnya perkembangan dunia usaha, maka dalam rangka memperkokoh keberadaan PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama para pelaku usaha, pemerintah pun menerbitkan ketentuan PT yang lebih komprehensif, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).¹

Pengertian PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya. Ketentuan ini berubah setelah diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut UU Cipta kerja menjadi “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 14.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



Usaha Mikro dan Kecil.”²

PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh subjek hukum manusia, sementara subjek hukum yang merupakan badan hukum tidak boleh mendirikan PT Perorangan. PT Perorangan statusnya merupakan badan usaha berbadan hukum sama halnya dengan PT Persekutuan Modal. Sebagaimana kita ketahui sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PT dibagi menjadi dua, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan dan keduanya berbadan hukum. Sehubungan dengan tanggung jawab, PT Perorangan pertanggung jawaban pendirinya hanya sebatas modal perusahaan. PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh pelaku usaha dengan kriteria UMKM, untuk mendirikan PT Perorangan maksimal modalnya Rp. 5 Miliar.

PT Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu dan atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Kemudian diatur juga dalam UU Cipta Kerja bahwa pendiri PT Perorangan hanya dapat mendirikan PT Perorangan sejumlah satu PT Perorangan dalam satu tahun. Kemudian ketentuan modal dasar PT juga berubah yaitu disebutkan di Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021, “Besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan”.³

Sebelum diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai PT terdapat didalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT didalam Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa PT harus didirikan minimal oleh dua orang, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada PT yang didirikan. Apabila pemegang saham dari PT menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru pada orang lain. Sehingga dari ketentuan tersebut jelas bahwa PT harus didirikan oleh dua orang. Hal ini berbeda sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana sekarang ini PT bisa didirikan oleh satu orang saja asalkan dia memenuhi kriteria sebagai UMKM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Dan Apa Saja Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dari narasumber dan observasi dari lapangan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis

²[Https://legalitas.org/tulisan/Ketentuan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja](https://legalitas.org/tulisan/Ketentuan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja),Diakses pada 19 Maret 2022.

³ [Https://jasanib.co/PT-Perorangan/](https://jasanib.co/PT-Perorangan/) Diakses pada 19 Maret 2022.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



secara langsung Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja⁴

Di dalam penelitian hukum digunakan data primer yaitu hasil wawancara dan pula menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis disini ialah studi pustaka (Library Research) Data ini diperoleh dengan mempelajari buku-buku referensi dan literatur, yakni berupa kumpulan pengetahuan yang bahannya memiliki relevansi dengan masalah yang peneliti teliti. Dan penelitian lapangan (Field Research) adalah wawancara terhadap pejabat terkait, metode wawancara ini guna mendapatkan langsung informasi yang akurat dari pejabat Notaris yang terkait.

Serta data akan dianalisis secara secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data yang terkumpul dan secara sistematis dalam kalimat terstruktur serta dikolerasikan dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan.⁵

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dalam pelaksanaan pendirian PT Perorangan selain berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, juga didasarkan Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini tetap dijadikan patokan karena dalam pendirian PT ada yang masih menggunakan Undang-Undang lama. Oleh sebab itu, dalam pendirian PT Perorangan tetap harus membandingkan dengan pendirian PT Persekutuan Modal. Selanjutnya dapat kita jelaskan pelaksanaan pendirian PT Perorangan.

Disini penulis terlebih dahulu menguraikan proses pendirian PT Persekutuan Modal. Pendirian PT Persekutuan Modal Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan pendirian yaitu sebagai berikut :

- a. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas (Nama PT minimal 3 suku kata, tidak boleh menggunakan Bahasa asing tidak boleh mengandung angka dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain).
- b. Pembuatan Akta Pendirian (dengan memerlukan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia).
- c. Menentukan Tempat Kedudukan atau Domisili PT (Badan hukum Indonesia harus memiliki kedudukan di Indonesia menurut UUPT, oleh karena itu PT sebagai suatu badan hukum harus memiliki domisili dan alamat yang jelas yang berada di wilayah Indonesia).
- d. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas (Maksud dan Tujuan kegiatan

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 29.

⁵ Subagyo. P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Praktik dan Teori*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm, 89-90.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/law>



usaha PT harus disesuaikan dengan melihat Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- e. Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum PT kepada Menteri (Paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, para pendiri atau notaris yang dikuasakannya mengajukan permohonan kepada Menteri secara online sebagaimana pengajuan permohonan nama PT).
- f. Setelah itu permohonan pengesahan dari menkumham akan disahkan dengan mengeluarkan SK Pengesahan Pendirian.

Selanjutnya penulis akan menguraikan proses pendirian PT Perorangan sebagai berikut :

Proses pendirian ini mengharuskan pendiri dengan mendaftarkan sendiri PT Perorangan secara elektronik ke Menterian Hukum dan HAM. Panduan Pendaftaran PT Perorangan terdapat pada laman <https://ahu.go.id>. Selanjutnya, Proses pendirian PT Perorangan yang terdapat didalam laman elektronik Kementerian Hukum dan HAM yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berikut kesimpulan yang mengenai proses pendirian PT Perorangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menentukan Nama PT Perorangan (Nama PT minimal 3 suku kata, tidak boleh menggunakan Bahasa asing, tidak boleh mengandung angka dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah digunakan oleh yang lain).
- b. Menentukan KBLI (Selanjutnya, menentukan kode kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2020).
- c. Mendaftarkan sendiri PT Perorangan (mendaftarkan PT Perorangan secara elektronik ke Menterian Hukum dan HAM, isi semua pernyataan yang ada dilaman elektronik tersebut sampai selesai).
- d. Menentukan Maksud dan Tujuan PT Perorangan dan menentukan tempat/Domisili PT Perorangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbedaan pendirian PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan adalah sebagai berikut :⁶

- ❖ PT Persekutuan Modal didirikan oleh 2 orang atau lebih sedangkan PT Perorangan hanya didirikan dengan satu orang.
- ❖ PT Persekutuan harus dengan memerlukan akta notaris sedangkan PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris.
- ❖ Dan PT Perorangan tidak memerlukan pembagian saham pada perusahaannya karena pemegang saham hanya satu orang.

Hambatan dari pendirian PT Perorangan, menurut wawancara dengan notaris ibu Nanda Angella, S.H., M.Kn. bahwa hambatan dari pendirian PT Perorangan sebenarnya tidak ada, namun ada salah satu hambatannya yaitu masyarakat masih bingung dalam menentukan KBLI

⁶ Wawancara dengan Notaris Ibu Nanda Angella, S.H., M.Kn. Tanggal 2 Juli 2022, jam 16.00.



(Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia) adalah kode klasifikasi tentang kegiatan ekonomi atau bidang usaha perusahaan di Indonesia atau maksud dan tujuan dari perusahaannya. Dan Pelaku Usaha masih tidak mengetahui bagaimana penginputan data pendirian PT tersebut.⁷

Kelebihan dan kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan

Kelebihan PT Perorangan yaitu sebagai berikut :

- Pendirian PT Perorangan cukup didirikan oleh satu orang saja
Kelebihan ini akan mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil untuk membuat usaha berbadan hukum resmi secara mandiri. Para pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu menggendeng mitra dalam praktik pendirian perusahaan.
- Dalam Pendiriannya tidak mengharuskan menggunakan akta notaris
Dalam pendirian PT Perorangan, seseorang pelaku usaha mikro dan kecil tidak memerlukan akta notaris. Para pelaku usaha mikro dan kecil cukup membuat surat pernyataan bermaterai untuk mendirikan PT Perorangan.
- Oleh karena merupakan badan hukum maka kekayaan individu terpisah dengan kekayaan perseroan.
Kelebihan lain dari perusahaan tipe ini merupakan terdapatnya pemisahan antara harta individu dan harta perusahaan. Bila perusahaan gulung tikar, hingga pertanggungjawaban hanya sampai pada harta perusahaan. Harta pemilik perusahaan akan tetap aman dan tidak tersentuh. Perihal itu sebab terdapatnya pemisahan antara harta individu dan harta perusahaan.
- Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik.
- Tidak ada kewajiban untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi.
- Memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki 100% saham secara sendirian.
- Tidak harus memerlukan modal besar dibandingkan dengan PT persekutuan modal.

Kekurangan PT Perorangan, ialah sebagai berikut :⁸

- Oleh karena hanya dipimpin oleh satu orang, maka perusahaan biasanya kesulitan mendapat bantuan modal dari orang lain sebab hanya tergantung pada satu orang.
- Semua Kegiatan perusahaan seperti pembelian, pemasaran, pengaturan karyawan, dan produksi hanya dilakukan oleh satu orang.
- Tidak diperbolehkan menambah pemilik saham. Apabila seseorang pengusaha ingin mempunyai rekanan dengan menambah pemilik perusahaan, perihal itu tidak diperbolehkan. Pengusaha tersebut wajib mengganti perusahaan perorangan menjadi perusahaan biasa.

⁷ Wawancara dengan Notaris Ibu Nanda Anggela, S.H., M.Kn. Tanggal 2 Juli 2022, jam 17.00.

⁸ Wawancara dengan Notaris Ibu Nanda Anggela, S.H., M.Kn. Tanggal 18 Mei 2022, jam 18.00.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejurnal.unitaspalembang.com/index.php/lid>



- Pemilik usaha mempunyai tanggung jawab ganda (Pengurus dan pemodal).
- Jenis PT Perorangan ini hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro.
- Modal terbatas.
- Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan perusahaan, harus dapat diselesaikan sendiri oleh pemilik perusahaan
- Keberlangsungan usaha kurang dapat dijamin karena modal dan pengelolaan hanya dilakukan oleh satu orang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah Proses pendirian ini mengharuskan pendiri dengan mendaftarkan sendiri PT Perorangan secara elektronik ke Menteri Hukum dan HAM. Panduan Pendaftaran PT Perorangan terdapat pada laman <https://ahu.go.id>. Selanjutnya, Proses pendirian PT Perorangan yang terdapat didalam laman elektronik Kementerian Hukum dan HAM yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Kelebihan dan kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan adalah Kelebihan Perseroan Terbatas Perorangan, diantaranya Dapat didirikan cukup 1 (satu) orang saja, Tidak memerlukan akta notaris, Kekayaan individu terpisah, Status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik, Memungkinkan pelaku usaha untuk memiliki 100% saham. Sedangkan Kekurangan Perseroan Terbatas Perorangan, diantaranya Hanya dipimpin oleh satu orang, Kegiatan semacam pembelian, pemasaran, pengaturan karyawan, dan produksi hanya dilakukan oleh satu orang, Tidak dapat menambah pemilik, Pemilik usaha mempunyai tanggung jawab ganda (Pengurus dan pemodal), Hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan mikro, serta Modal terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulKadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Abadi, Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2005.
- Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Andi, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2012.
- Hamdani, *Mengenal UMKM Lebih Dekat*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, 2020.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.com/index.php/law>



pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

http://www.hukumonline.com/Badan_Usaha_yang_Berbadan_Hukum.

https://id.wikipedia.org/wik/Badan_Usaha.

<Https://jasanib.co/PT-Perorangan>.

<Https://legalitas.org/tulisan/Ketentuan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>.

Https://www.ocbcnisp.com/Pengertian_UMKM.

<Https://smartlegal.id/uu-cipta-kerja/2020/11/09/Tok-UU-Cipta-Kerja-Sah-Ketentuan-UUPT-Ini-Telah-Diubah>.